

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani semakin meningkat sejalan dengan perubahan selera, gaya hidup dan peningkatan pendapatan. Karena, selain rasanya yang lezat sumber protein hewani memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Pemenuhan gizi yang baik dapat meningkatkan produktivitas penduduk. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan pemenuhan protein hewani yang diwujudkan dalam program kedaulatan pangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Sumber protein hewani dipenuhi oleh bagian dari sektor pertanian yaitu subsektor peternakan, sehingga peningkatan produksi produk subsektor peternakan berpengaruh dalam mensukseskan ketahanan pangan.

Subsektor peternakan berfungsi sebagai penyedia protein hewani bagi konsumsi rumah tangga maupun bahan baku industri. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014 (lampiran 8) kontribusi subsektor peternakan menempati urutan ke-4 terhadap sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto Nasional setelah tanaman perkebunan, perikanan, dan tanaman pangan. Dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12 persen terhadap sektor pertanian dan 1,81 persen

terhadap Produksi Domestik Bruto Nasional dari tahun 2009-2013. Dengan rata – rata tersebut subsektor peternakan memiliki peran yang cukup penting dengan melihat kontribusinya terhadap perkembangan Produk Domestik Bruto Nasional.

Salah satu produk subsektor peternakan yang berperan memenuhi kebutuhan protein hewani adalah daging sapi. Daging sapi merupakan keluaran dari agribisnis sapi potong yang masuk ke dalam sepuluh bahan pangan pokok dan strategis nasional (Kemendag, 2014). Berdasarkan data konsumsi statistik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015, konsumsi daging sapi menempati urutan ketiga terbesar setelah ayam ras dan ayam kampung. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging sapi dari tahun 2005 hingga 2012 dengan rentang sebesar 1,8-2,09 kg/kapita/tahun. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Jerman, Amerika, Australia, dan Filipina. Konsumsi daging sapi di Malaysia adalah 7 kg/kapita/tahun, Singapura 7 kg/kapita/tahun, Jepang 9,7 kg/kapita/ tahun, Jerman 50 kg/kapita/tahun, Filipina 4 kg/kapita/tahun, Amerika dan Australia 30 - 40 kg/kapita/tahun (Kemendag, 2012).

Di sisi lain tingkat konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia yang mencapai 1,8-2,09 kg/kapita/tahun dengan total populasi 233,3 juta jiwa tersebut belum 100 persen dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Pasokan daging sapi di Indonesia ditopang oleh dua sumber yaitu sumber lokal dan sumber impor. Sumber lokal menyumbang sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional pertahunnya sedangkan sisanya dipenuhi oleh impor baik berupa daging sapi maupun sapi bakalan (Kementan, 2010).

Tabel 1. Konsumsi Daging Sapi, Produksi Daging Sapi, dan Impor Daging Sapi di Indonesia Tahun 2008-2012 (dalam ton)

Tahun	konsumsi	Produksi		impor daging
		sapi lokal	sapi impor	
2008	395.244	222.656	169.844	58.265
2009	413.087	213.477	195.823	77.843
2010	440.744	349.967	86.465	86.781
2011	448.931	410.698	74.635	69.694
2012	544.896	425.495	79.982	37.696

Sumber : BAPPENAS, 2013 dan UNComtrade, 2016

Perkembangan Konsumsi Daging Sapi, Produksi Daging Sapi, dan Impor Daging Sapi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwasanya perkembangan konsumsi daging sapi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhinya. Karena ketidakmampuan peternak lokal untuk memenuhi konsumsi daging sapi dalam negeri, maka Indonesia mengimpor daging sapi dari luar negeri.

Impor daging yang pada awalnya bertujuan untuk mendukung dan mencukupi kebutuhan daging sapi nasional justru lebih cenderung terjadi peningkatan dan mengganggu usaha agribisnis sapi potong lokal. Harga daging, jeroan dan sapi bakalan impor relatif lebih murah karena manajemen budidaya dan pengelolaan sumber daya produksi sapi di negara pengekspor sangat efisien dibandingkan dengan Indonesia (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2011).

Kegiatan agroindustri sapi potong skala besar semakin bergeser dari kegiatan *feedlotting* menjadi kegiatan yang lebih ke hilir, yaitu impor daging sapi salah satunya impor daging sapi beku. Hal ini dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat, mengingat kegiatan impor daging sapi yang begitu pesat

sehingga mengurangi insentif masyarakat untuk membudidayakan sapi potong dalam negeri. Kebutuhan daging sapi yang meningkat menyebabkan pemotongan terhadap sapi betina lokal produktif juga meningkat. Hal ini menyebabkan stok bibit nasional semakin berkurang dan menghambat penambahan populasi sapi lokal.

Menanggapi hal tersebut pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan guna mewujudkan kecukupan daging sapi dalam negeri. Dari tahun 2000 hingga saat ini telah terdapat tiga kebijakan diantaranya Program Kecukupan Daging Sapi (2000-2005), Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (2005-2010), Program Swasembada Daging Sapi (2010-2014) dan yang terbaru adalah Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah merupakan upaya yang sangat relevan untuk ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan impor daging sapi sampai pada batas 10 persen dari kebutuhan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010). Impor daging sapi yang selama ini dilakukan tidak lain untuk mengisi *excess demand* agar konsumsi daging sapi dapat dipenuhi. Oleh karena itu perlu ada target produksi dari sisi penawaran dan target konsumsi dari sisi permintaan yang seimbang, agar swasembada daging sapi bisa terwujud.

Program Kecukupan Daging Sapi dan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi yang lalu belum berhasil dalam mengatasi masalah kurangnya ketersediaan daging sapi lokal di dalam negeri. Ini berdampak pada kekurangan *supply* daging sapi yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu yang menyebabkan

kenaikan harga daging sapi dengan laju pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 17,52 persen jika dibandingkan dari tahun sebelumnya (lampiran 5).

Berdasarkan gambaran permasalahan yang dibahas di atas, maka diperlukan suatu kajian atau penelitian yang membahas mengenai **“Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Impor Daging Sapi di Indonesia (periode 2003 – 2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kecenderungan volume impor daging sapi di Indonesia pada selang waktu 2003 – 2013.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi impor daging sapi di Indonesia pada selang waktu 2003 – 2013.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi kecenderungan volume impor daging sapi di Indonesia pada selang waktu 2003 – 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi impor daging sapi di Indonesia pada selang waktu 2003 – 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pemerintah Indonesia dan instansi yang terkait dalam melakukan impor daging sapi.

2. Sebagai tambahan informasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan impor daging sapi agar mengurangi ketergantungan impor daging sapi.
3. Untuk peneliti-peneliti lainnya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan atau perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

